

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)**

**Disampaikan dalam Konferensi Pers
Nota Keuangan dan RAPBN 2011**

**Jakarta,
Agustus 2010**



POKOK BAHASAN

1

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah

- Reformasi 1998 - Mendatang
- Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014
- Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah

2

Prioritas RKP 2011

- Perekonomian Nasional
- Tantangan Pembangunan
- Tema RKP 2011
- Alokasi pada Prioritas 2011
- Alokasi 16 Besar K/L 2011
- Sasaran Pembangunan Infrastruktur 2011
- Sasaran Energi 2011

3

Percepatan Penyerapan Anggaran

- Latar Belakang Percepatan Penyerapan Anggaran
- Langkah Percepatan Anggaran

4

Lampiran

- *Highlights* Prioritas RKP 2011
- Langkah Percepatan Anggaran

1

**ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH**



REFORMASI: MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

- **REFORMASI GELOMBANG PERTAMA (1998-2008)**
 - TRANSISI DEMOKRASI, dengan sistem *check and balance* antara legislatif, yudikatif, dan judikatif.
 - DESENTRALISASI yang sangat ekspansif (demokrasi langsung, desentralisasi fiskal)
 - PENYELESAIAN KONFLIK di Aceh, reformasi politik di Papua, dan membangun perdamaian yang berkelanjutan di daerah-daerah pasca-konflik.
- **REFORMASI GELOMBANG KEDUA**
 - Mempertegas haluan, memacu laju perubahan.
 - Jangka pendek: *de-bottlenecking*.
 - Jangka Menengah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.



PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010-2014

RPJMN 2010-2014

- | | |
|--|---|
| 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola | 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana |
| 2 Pendidikan | 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik |
| 3 Kesehatan | 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi |
| 4 Penanggulangan Kemiskinan | 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan |
| 5 Ketahanan Pangan | 13 Bidang Perekonomian |
| 6 Infrastruktur | 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha | |
| 8 Energi | |



- Inpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
- Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

Sudah jelas dan konkrit sasaran dan K/L Pelaksana :

- Program
- Kegiatan
- Outcome
- Output
- Pendanaan Indikatif



TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT-DAERAH



Tata Kelola (*Governance*)

Kualitas Birokrasi
dan SDM Aparatur
(Responsif,
transparan dan
akuntabel)

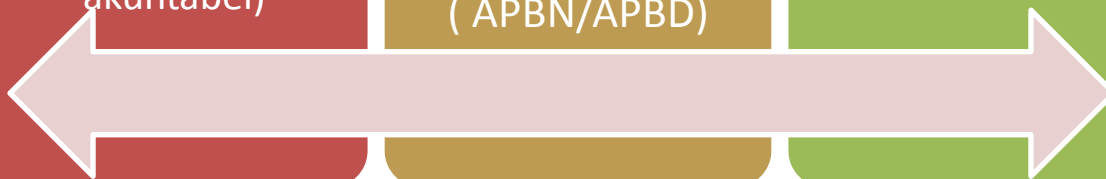


Sinergi Pusat dan Daerah

Pengelolaan
Kebijakan dan
Sumber
Pendanaan
(APBN/APBD)



Sasaran Pembangunan Nasional



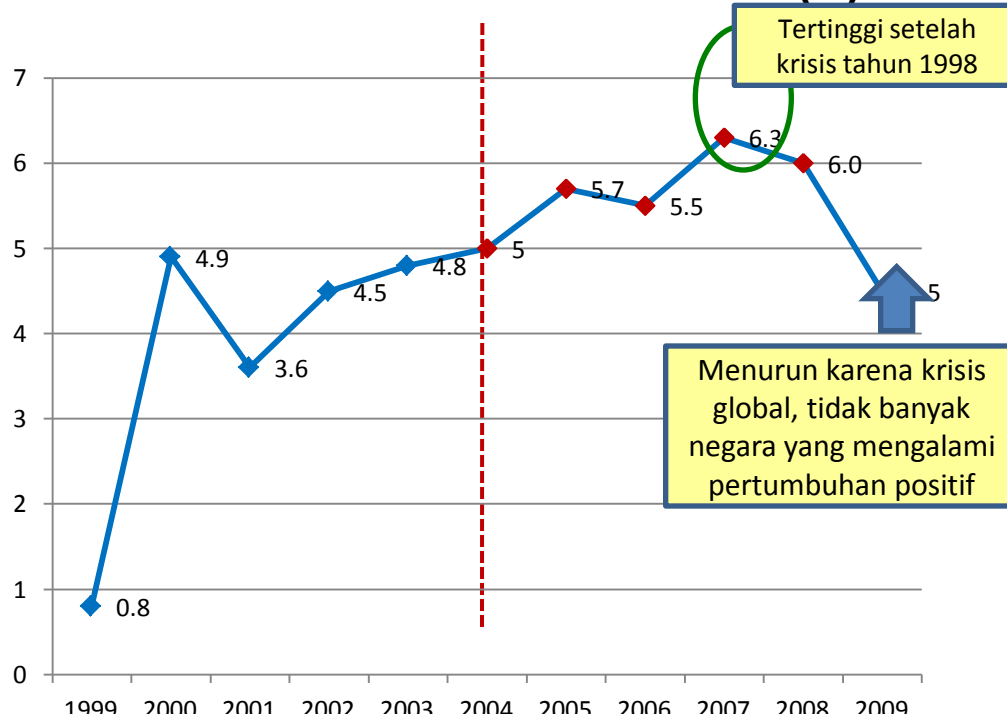
2

PRIORITAS RKP TAHUN 2011

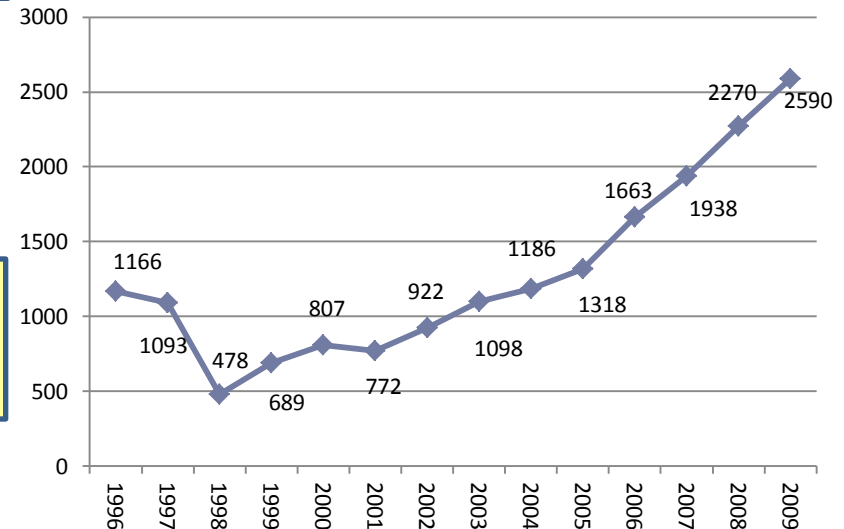


PEREKONOMIAN NASIONAL

Pertumbuhan Ekonomi 1999-2009 (%)



PDB per Kapita (Harga Berlaku, USD)



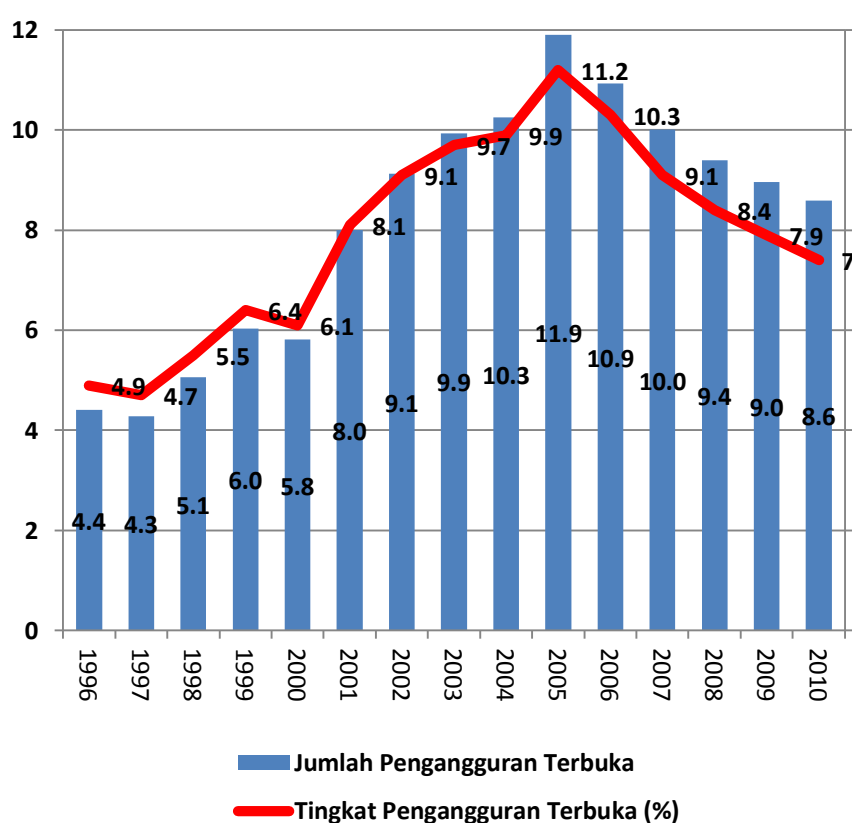
Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,5% per tahun, dengan pendapatan per kapita yang terus meningkat . . .



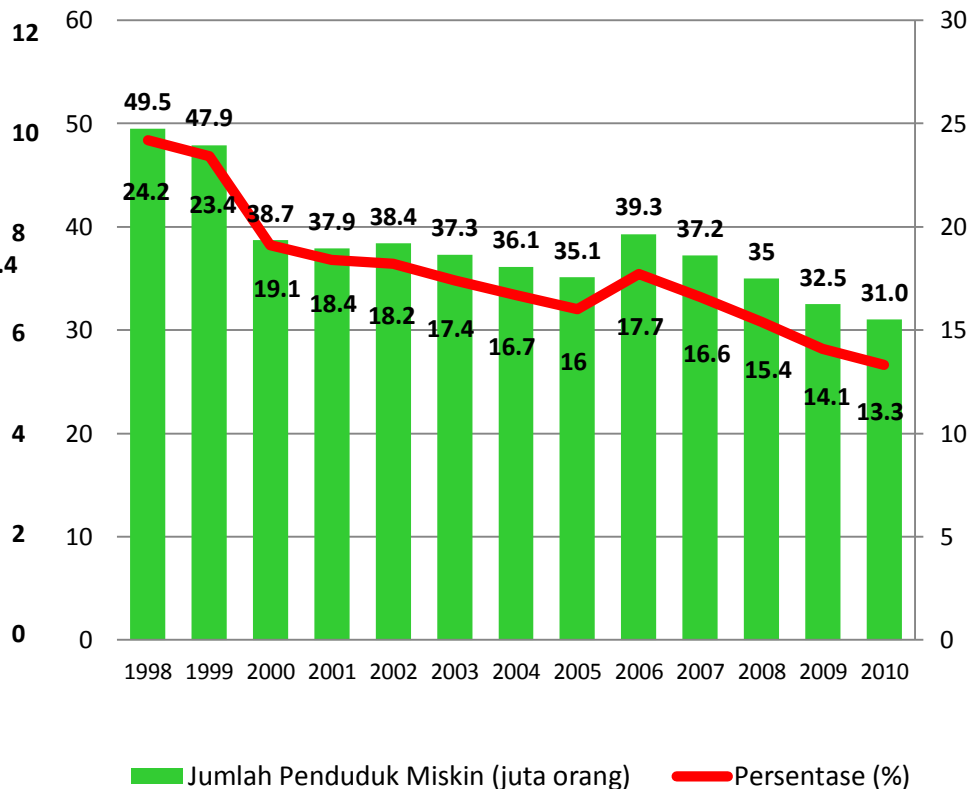
TANTANGAN PEMBANGUNAN

KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS

Pengangguran 1996-2010



Kemiskinan 1998-2010



... angka pengangguran menurun ke 7,4% dan angka kemiskinan menjadi 13,3%.
Ke depan tingkat kemiskinan dan pengangguran akan terus diupayakan menurun



TEMA RKP 2011

“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT
DAERAH”

RKP 2010

**PEMULIHAN PEREKONOMIAN
NASIONAL DAN PEMELIHARAAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

TINGKAT PERTUMBUHAN

Pertumb. Ek. (%) : 5,8

KUALITAS PERTUMBUHAN

Tk. Pengangguran (%) : 7,6

Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5

RKP 2011

**PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKEADILAN DIDUKUNG
PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI
PUSAT DAERAH**

TINGKAT PERTUMBUHAN

Pertumb. Ek. (%) : 6,3

KUALITAS PERTUMBUHAN

INKLUSIF DAN BERKEADILAN

Tk. Pengangguran (%) : 7,0

Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5



ALOKASI PADA PRIORITAS 2011

(Rp Miliar)

PRIORITAS/SUBSTANSI INTI	ALOKASI K/L	SUBSIDI/PSO	PEMBIAYAAN	TOTAL
PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA	1.377,4	0,0	0,0	1.377,4 *)
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN	52.532,3	0,0	0,0	52.532,3
PRIORITAS 3 : KESEHATAN	11.484,2	50,0	0,0	11.534,2
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN	31.321,1	16.011,9	2.000,0	49.333,0
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN	18.657,4	19.434,8	0,0	38.092,2
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR	43.446,5	2.752,6	17.377,9	63.577,0
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA	1.801,2	104,0	0,0	1.905,2
PRIORITAS 8 : ENERGI	10.927,0	0,0	0,0	10.927,0
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA	4.712,5	0,0	0,0	4.712,5
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK	11.849,5	0,0	0,0	11.849,5
PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI	484,7	0,0	0,0	484,7
PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEMAMAN, BIDANG PEREKONOMIAN, DAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.857,1	0,0	0,0	5.857,1
TOTAL ALOKASI PADA PRIORITAS	194.450,9	38.353,3	19.377,9	252.182,1

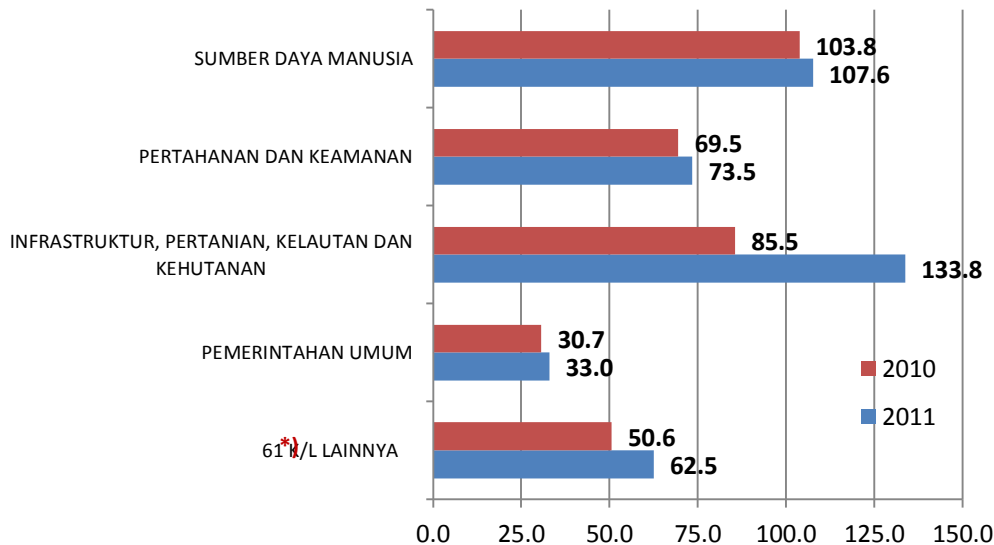
*) Tidak termasuk remunerasi akibat dari Reformasi Birokrasi



ALOKASI 16 BESAR K/L 2011

- Sesuai dengan tema RKP 2011 (mempercepat pertumbuhan ekonomi), kelompok infrastruktur, pertanian, kelautan dan kehutanan mengalami kenaikan paling besar (56,4%) dari tahun 2010
- Upaya *pro-environment* ditunjukkan dengan kenaikan alokasi Kem. Kehutanan sebesar 77,2%

ALOKASI 16 BESAR K/L 2011



Pro-Growth; Pro-Job; Pro-Poor; Pro-Environment

*) Termasuk kenaikan Rp 3,1 T untuk Kemenpera (Rp 1,9 T) dan BKKBN (Rp 1,2 T)

**) Terdapat pemindahan alokasi untuk BOS sebesar Rp 16,8 T

KEMENTERIAN/LEMBAGA	SHARE 2011 (%)	% KENAIKAN
16 K/L TERBESAR	84,8	20,2
SUMBER DAYA MANUSIA	26,2	3,7
Kem. Pendidikan Nasional **)	12,3	-8,8
Kem. Agama	7,6	13,9
Kem. Kesehatan	6,4	22,7
PERTAHANAN DAN KEAMANAN	17,9	5,7
Kem. Pertahanan	11,0	6,8
Kepolisian RI	6,9	4,1
INFRASTRUKTUR, PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN	32,6	56,4
Kem. PU	13,8	62,4
Kem. Perhubungan	5,2	35,0
Kem. ESDM	3,7	94,2
Kem. Pertanian	4,1	109,0
Kem. Dalam Negeri	3,2	5,8
Kem. Kelautan dan Perikanan	1,2	49,3
Kem. Kehutanan	1,4	77,2
PEMERINTAHAN UMUM	8,0	7,6
Kem. Keuangan	4,0	7,7
Mahkamah Agung	1,5	16,0
Kem. Luar Negeri	1,4	1,3
Kem. Hukum dan HAM	1,2	5,3
61 K/L LAINNYA	15,2	23,5
TOTAL	100,0	20,7



SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2011

ARAH KEBIJAKAN

MENINGKATKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI SPM

Penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan.

MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR RIIL

Penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

MENINGKATKAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)

Pengembangan infrastruktur yang dapat memenuhi pemulihan biaya melalui struktur tarif yang mempertimbangkan aspek sosio-ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat.

SASARAN

1. Mendukung ketahanan pangan nasional.

Meningkat dan optimalnya layanan irigasi dan rawa seluas 3,34 juta hektar

2. Meningkatkan keterhubungan antarwilayah (domestic connectivity)

- Kapasitas jalan meningkat 2.830 Km
- Pem. Pelabuhan Tg.Priok, Belawan dan 7 pel. lainnya

3. Memperkuat virtual domestic interconnectivity (Indonesia connected)

- Jasa akses telekomunikasi di 33.259 desa, internet di 5.748 kecamatan dg tingkat pencapaian 20%, Regional Internet Exchange di 10 kota, Community Access Point di 222 kec;

4. Meningkatkan akses RT terhadap hunian yang didukung prasarana dan sarana dasar permukiman

- Pembangunan rusunawa 170 TB; subsidi perumahan sebanyak 92.927 unit
- Penyediaan air minum (187 L/detik untuk 63 juta jiwa penduduk)
- Pembangunan sarpras air limbah sistem off-site dan on-site bagi 1,11 juta jiwa penduduk

6. Ketersediaan Air Baku dan Pengendalian Banjir

Meningkatnya, prasarana air baku kapasitas 5,89 m3/det



SASARAN ENERGI 2011

ENERGI 2011

Peningkatan kapasitas pembangkit listrik	5.279 MW
Meningkatnya rasio elektrifikasi	70,4% (dari 67,2% di 2010)
Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi	PLTP 158 MW

STRATEGI PENGEMBANGAN ENERGI GEOTHERMAL

1998- s/d sekarang

Kapasitas terpasang PLTP
1.000 MW

VS

Potensi PLTP
27.000 MW

Tuntutan dunia
internasional
& masyarakat
akan energi bersih

5 tahun ke depan

Penambahan kapasitas
terpasang PLTP sebesar
5.000 MW

3

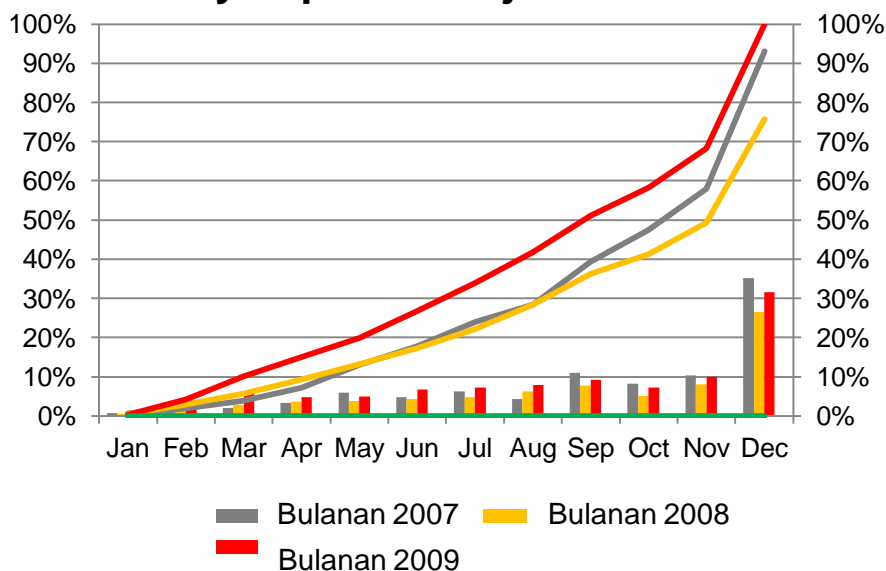
LANGKAH PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN



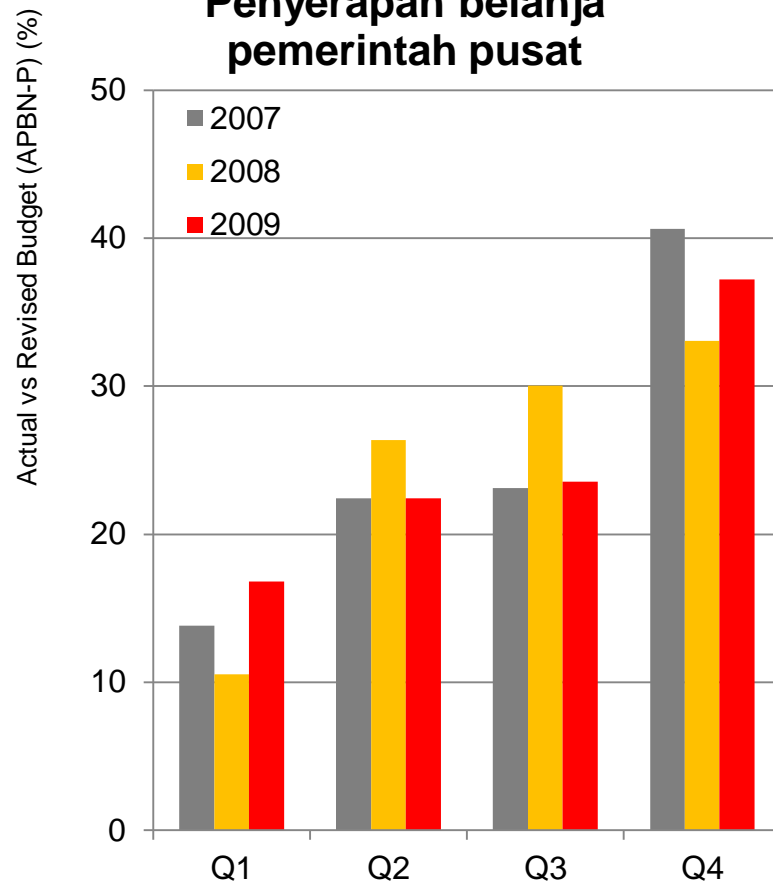
LATAR BELAKANG PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN

- Penyerapan belanja berjalan lambat (utamanya belanja modal) dan masih menumpuk di akhir tahun sehingga mengakibatkan :
 - Dampak ke perekonomian kurang optimal
 - Kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan

Penyerapan belanja modal K/L



Penyerapan belanja pemerintah pusat





LANGKAH PERCEPATAN PENYERAPAN




Penerbitan Revisi Keppres No. 80 Tahun 2003 (Perpres No. 54 Tahun 2010)



Perbaiki Peraturan/Ketentuan/SOP Penganggaran

Meningkatkan Insentif bagi pejabat perbendaharaan K/L



Peningkatan Pelatihan SDM K/L untuk meningkatkan kemampuan perencanaan, penganggaran dan pengadaan

Peningkatan sosialisasi berbagai peraturan, ketentuan dan SOP perencanaan, penganggaran dan pengadaan.



TERIMA KASIH

4

LAMPIRAN



***HIGHLIGHTS* PRIORITAS
RKP 2011**



PENDANAAN K/L RAPBN 2011

(Triliun Rupiah)

SUMBER PENDANAAN	2010		RAPBN 2011
	APBN	APBN-P	
RUPIAH MURNI	294,3	320,4	353,4
PHLN	24,3	24,3	28,7
PDN	1,0	1,0	1,0
PNBP/BLU	20,5	20,5	27,3
TOTAL	340,1	366,2	410,4



HIGHLIGHTS RKP 2011

KEGIATAN	INDIKATOR (KELUARAN)	PERANAN DAERAH
PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI		
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	100% K/L yang melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional	Menyusun Grand Design reformasi birokrasi di daerah
Harmonisasi regulasi	Jumlah Perda yang dikaji (9.000 perda)	Pengendalian penyusunan perda
Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Jumlah penduduk yang menerima e-KTP (24,8 juta jiwa di 75 kab/kota)	Penguatan unit Pemda untuk administrasi kependudukan di kab/kota sampai kecamatan
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN		
Penyediaan subsidi Pendidikan dasar dan menengah (BOS)	Jumlah siswa (44,5 juta siswa)	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan data siswa penerima BOS;• Pengawasan pelaksanaan.





HIGHLIGHTS RKP 2011



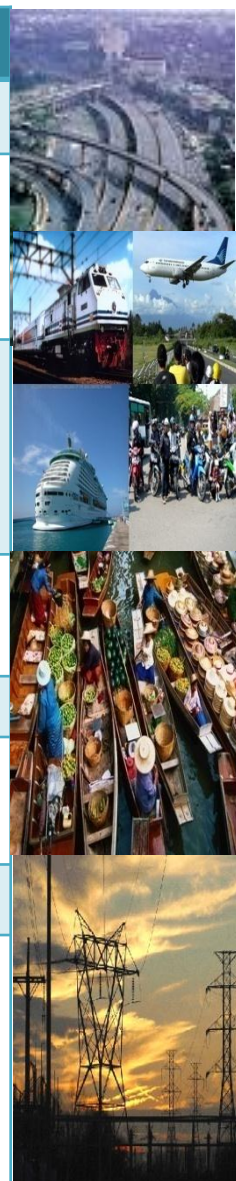
KEGIATAN	INDIKATOR (KELUARAN)	PERANAN DAERAH
PRIORITAS 3 : KESEHATAN		
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah puskesmas (8.608 puskesmas)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data puskesmas penerima BOK; • Pengawasan pelaksanaan
Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah klinik KB Pemerintah dan swasta (23.500 klinik KB)	Memperkuat unit Pemda untuk pelayanan KB di kab/kota
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN		
PNPM Mandiri	Cakupan penerapan PNPM dan Penguatan PNPM (1.500 desa, 10.948 kelurahan; 5.453 kec dan 75 kab tertinggal)	Sinkronisasi kegiatan daerah dengan PNPM
Bantuan Tunai Bersyarat	1,1 juta RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan fasilitas kesehatan dan pendidikan siap untuk mendukung pelaksanaan PKH • Melakukan koordinasi pelaksanaan semua pihak terkait
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN		
Perluasan areal pertanian	Luasan perluasan (519.570 ha)	Menyusun perda-perda untuk implementasi UU 41/2001 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pengembangan pelabuhan perikanan	Jumlah pelabuhan perikanan (973 pelabuhan)	Pemilihan dan penetapan lokasi pelabuhan



KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS

HIGHLIGHTS RKP 2011

KEGIATAN	INDIKATOR (KELUARAN)	PERANAN DAERAH
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR		
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional	Pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT dan Papua (2.830 km)	Peningkatan jalan provinsi dan kab/kota yang terintegrasi dengan jalan nasional/lintas serta dukungan penyediaan lahan
Pembangunan pelabuhan	Pelabuhan Tg.Priok, Belawan dan 7 pel. Lainnya (Dumai, Balikpapan/ Kariangau, Manado, Bitung, Ambon, Jayapura dan Sorong)	Penyediaan lahan dan pembangunan prasarana sisi darat
Perencanaan tata Ruang Wilayah Nasional	Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan (33 RTRW)	Penyelesaian RTRW propinsi dan RTRW kab/kota
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA		
Koordinasi Pengembangan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah	Persentase peraturan pelaksanaan UU KEK yang terselesaikan (70%)	Menyusun Perda yang mendukung pelaksanaan KEK
PRIORITAS 8 : ENERGI		
Peningkatan rasio elektrifikasi	70,4%	Ijin prinsip lokasi, dukungan penyediaan lahan, persetujuan AMDAL, persetujuan penggunaan kawasan hutan, RTRW, dan lelang wilayah kerja panas bumi pertambangan
Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi (geothermal)	PLTP 158 MW	





HIGHLIGHTS RKP 2011



KEGIATAN	INDIKATOR (KELUARAN)	PERANAN DAERAH
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA		
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan	Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan, magrove, gambut ,rawa, lahan kritis dan hutan kota (642.000 ha)	<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan rehabilitasi kawasan hutan kritis dan DAS;• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK		
Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Meningkatnya kondisi perekonomian kawasan perbatasan (khususnya di 27 kab/kota yang tergolong daerah tertinggal)	<ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan rencana pengembangan ekonomi• Menyiapkan kelembagaan pengelolaan perbatasan
PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI		
Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan dan permuseuman	Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu 3 cagar budaya dan 30 museum yang direvitalisasi	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan data cagar budaya dan museum• Pengawasan pelaksanaan pengelolaan cagar budaya dan revitalisasi museum



HIGHLIGHTS RKP 2011

KEGIATAN	INDIKATOR (KELUARAN)	PERANAN DAERAH
PRIORITAS LAINNYA		
Produksi Alutsista Industri dalam negeri	Kapasitas jumlah produksi Alutsista industri dalam negeri yang direalisasikan (24 persen)	---
Penanganan terorisme melalui deradikalisasi	Jumlah forum sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan dan beroperasinya BNPT	Ikut mendukung dan mengawasi pembinaan kelompok radikal
Pembinaan, penempatan, dan perlindungan TKI Luar Negeri	100% calon TKI terlayani	Rekrutmen, fasilitasi pengurusan dokumen dan pelayanan penempatan
Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata	450 desa wisata	<ul style="list-style-type: none">•Menentukan lokasi sasaran•Mensinergikan PNPM Mandiri Pariwisata dengan PNPM Mandiri lainnya•Pembinaan lembaga keswadayaan masyarakat





LANGKAH PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN



PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYERAPAN

Masalah perencanaan anggaran dan persiapan pelaksanaan

Masalah pada eksekusi anggaran sepanjang tahun anggaran

Masalah pada eksekusi anggaran pada akhir tahun anggaran



1. Penerbitan Revisi Keppres No. 80 Tahun 2003 (Perpres No. 54 Tahun 2010)

- Ruang Lingkup – Pendanaan dengan PHLN
- Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Keharusan melaksanakan *E-Procurement*
- Delegasi kewenangan dan tanggung jawab lebih besar ke PA
- Memperkuat keberpihakan pada usaha kecil:
- Adanya ketentuan untuk pengadaan barang/jasa hasil kreatifitas, gagasan, inovasi, riset, produk seni-budaya
- Lebih fleksibel dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat:
- Penunjukan Langsung untuk barang/jasa khusus:
- Pengadaan di luar negeri
- Kontrak Tahun Jamak :
- Preferensi Harga dan Tingkat Komponen Dalam Negeri
- Sanggah dan Sanggahan Banding:
- Konsep Ramah Lingkungan



2. Perbaiki Peraturan/Ketentuan/SOP Penganggaran



- Amandemen Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN untuk aturan *multiyears contract* dan penunjukan pejabat perbendaharaan K/L yang tidak perlu setiap tahun.
- Menetapkan RPMK tentang norma waktu penyelesaian SPP dan SPM oleh K/L yang diarahkan selesai dalam 12 hari → Percepatan pencairan anggaran
- Mengintegrasikan proses administrasi SAPSK dan DIPA mulai TA 2011 → Memperpendek proses administrasi



LANJUTAN . . .

3. Meningkatkan Insentif bagi pejabat perbendaharaan K/L → meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pejabat perbendaharaan (PPK, Bendahara, Panitia Pengadaan, Pejabat Verifikasi, dan Pejabat Penerbit SPM)

- Meningkatkan Standar Biaya Umum (SBU) bagi pejabat perbendaharaan
- Mempertimbangkan jabatan fungsional bagi pejabat perbendaharaan





LANJUTAN . . .

4. Peningkatan Pelatihan SDM K/L untuk meningkatkan kemampuan perencanaan, penganggaran dan pengadaan (termasuk penyusunan *Procurement Plan dan Disbursement Plan*, penyusunan TOR dan FS)



5. Peningkatan sosialisasi berbagai peraturan, ketentuan dan SOP perencanaan, penganggaran dan pengadaan.

- Sosialisasi Revisi Keppres No. 80 tahun 2003
- Sosialisasi pemerosesan SP2D oleh Ditjen Perbendaharaan sudah distandarkan yaitu dalam satu jam selesai
- Sosialisasi PMK tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan RKAKL yang komprehensif.

